

## Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Pendistribusian Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Gita Refika Nainggolan<sup>\*1</sup> Johnson Pasaribu<sup>2</sup> Maringan Panjaitan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia  
[gita.refika@student.uhn.ac.id](mailto:gita.refika@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [jhonson.pasaribu@uhn.ac.id](mailto:jhonson.pasaribu@uhn.ac.id)<sup>2</sup> [maringan.panjaitan@uhn.ac.id](mailto:maringan.panjaitan@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pendamping PKH sebagai informan kunci, masyarakat penerima bantuan sebagai informan utama, serta aparatur desa sebagai informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi bantuan PKH telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah, yaitu melalui proses pendataan, verifikasi data penerima, serta penyaluran bantuan secara bertahap melalui sistem perbankan. Bantuan yang diberikan dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme program, serta keterbatasan informasi terkait proses distribusi bantuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi distribusi Program Keluarga Harapan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan perbaikan dalam proses pendataan penerima manfaat, peningkatan sosialisasi program kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih optimal agar distribusi bantuan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** *implementasi distribusi, program keluarga harapan (pkh), kesejahteraan masyarakat.*

### Abstract

*This study aims to examine how the distribution implementation of the Family Hope Program (PKH) contributes to improving community welfare and to identify the obstacles that occur during its implementation in the field. This research uses a qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The informants in this study consist of PKH facilitators as key informants, beneficiary communities as main informants, and village officials as additional informants. The results of the study show that the implementation of PKH assistance distribution has been carried out in accordance with the procedures established by the government, namely through the processes of data collection, verification of beneficiary data, and the gradual distribution of assistance through the banking system. The assistance provided is considered capable of helping to reduce the economic burden of beneficiary families, especially in meeting education and health needs. However, in its implementation, several obstacles were still found, such as the inaccuracy of the assistance targeting, the lack of understanding among some community members regarding the program mechanism, and limited information related to the assistance distribution process. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of the Family Hope Program (PKH) distribution plays an important role in supporting the improvement of community welfare. Nevertheless, improvements are still needed in the process of beneficiary data collection, increasing program socialization to the community, and more optimal supervision so that the distribution of assistance can run more effectively and be more accurately targeted.*

**Keywords:** *distribution implementation, family hope program (pkh), community welfare.*

## 1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin serta terciptanya kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, isu mengenai kemiskinan dan

ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Meningkatnya jumlah keluarga miskin di berbagai wilayah menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu aspek fundamental dalam pembangunan nasional, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai strategi dan kebijakan perlindungan sosial. Salah satu instrumen utama dalam upaya tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah skema bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Kementerian Sosial RI dalam Pedoman PKH (2021): Bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Program ini menjadi pilar penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena tidak hanya memberikan bantuan materiil, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui syarat-syarat kepatuhan yang ditetapkan bagi penerima manfaat.

Secara nasional, kondisi kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan perkembangan yang dinamis. Meskipun angka kemiskinan Indonesia mengalami tren penurunan dalam satu dekade terakhir, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu keluar dari kondisi rentan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses terbatas terhadap layanan publik. Disparitas kesejahteraan ini semakin mengemuka di tengah berbagai tantangan sosial seperti inflasi, naiknya harga kebutuhan pokok, dan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Situasi ini menuntut perhatian pemerintah untuk mengimplementasikan program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program utama yang menjadi tumpuan dalam upaya tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan kategori tertentu seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia. Melalui bantuan bersyarat ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Secara konseptual, PKH memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kapabilitas keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui intervensi jangka panjang dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan finansial, namun juga mengedepankan perubahan perilaku melalui kewajiban-kewajiban tertentu seperti pemeriksaan kesehatan rutin, kehadiran anak di sekolah, dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan keluarga. Dengan demikian, keberhasilan PKH sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pendampingan yang intensif, serta pendistribusian bantuan yang merata dan transparan.

Dalam konteks tersebut, Program Keluarga Harapan hadir sebagai upaya konkret pemerintah untuk menjangkau keluarga sangat miskin dan rentan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar. PKH memberikan bantuan tunai yang disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dan menciptakan fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai fenomena sosial yang menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan PKH di berbagai daerah, termasuk di Desa Pondok Batu, Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Desa ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang beragam, dengan sebagian keluarga berada pada kategori miskin dan sangat miskin. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak menentu.

Situasi ini membuat masyarakat sangat membutuhkan intervensi sosial seperti PKH untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Fenomena yang ditemukan di Desa Pondok Batu menunjukkan bahwa meskipun PKH telah berjalan selama bertahun-tahun, terdapat sejumlah isu penting terkait implementasi program, khususnya dalam hal pendistribusian bantuan. Beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) mengeluhkan ketidaktepatan waktu penyaluran, kurangnya informasi mengenai kriteria bantuan, hingga dugaan ketidaktepatan sasaran penerima. Selain itu, dinamika sosial seperti kecemburuan sosial antarwarga, ketergantungan terhadap bantuan tanpa peningkatan kemandirian, serta lemahnya pendampingan menjadi persoalan yang berdampak langsung pada efektivitas program.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan terkait pendistribusian bantuan PKH di Desa Pondok Batu. Permasalahan tersebut meliputi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana bantuan, kurang optimalnya pemanfaatan bantuan oleh KPM, serta kendala dalam proses verifikasi dan pembaruan data. Ketidaktepatan sasaran menjadi isu yang sering disoroti oleh masyarakat karena masih ditemukan keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap menerima bantuan, sementara keluarga yang lebih membutuhkan justru tidak terdaftar. Keterlambatan pencairan dana juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi keluarga penerima yang mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Di sisi lain, pendamping PKH di desa ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, keterbatasan sarana komunikasi, dan kesulitan dalam menjangkau seluruh KPM secara optimal. Situasi ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan PKH dan menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya menggali lebih dalam mengenai fenomena implementasi PKH di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga miskin di Desa Pondok Batu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa, pendamping PKH, serta pihak terkait lainnya dalam memperbaiki mekanisme pendistribusian bantuan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menegaskan urgensi penelitian mengenai implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pendistribusian bantuan di Desa Pondok Batu Aek Nabara sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan teoritis dan empiris, tetapi juga menjadi dasar bagi perbaikan program sosial di tingkat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan berikut: (1) Bagaimana implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam proses pendistribusian bantuan di Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian bantuan PKH di Desa Pondok Batu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mendeskripsikan proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pendistribusian bantuan di Desa Pondok Batu, (2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang muncul dalam pendistribusian bantuan PKH, (3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendistribusian bantuan PKH terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting setelah suatu kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Pada tahap ini, keputusan politik yang telah dibentuk harus diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan yang nyata. Proses implementasi melibatkan berbagai aktor mulai dari birokrat, lembaga pelaksana, hingga masyarakat sebagai penerima kebijakan. Menurut Subarsono (2011), Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Budi Winarno (2012), Implementasi kebijakan adalah

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), implementasi mengacu pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, mulai dari penyaluran bantuan, pemutakhiran data, hingga proses pemberdayaan melalui kegiatan P2K2. Implementasi yang baik akan memastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) menerima hak mereka sesuai ketentuan dan memperoleh pendampingan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan sosial bersyarat (conditional cash transfer) dari pemerintah yang ditujukan kepada keluarga miskin. Program ini bertujuan membantu keluarga penerima manfaat agar dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui bantuan tunai yang diberikan secara berkala, pemerintah berharap dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga serta mendorong mereka agar lebih aktif memanfaatkan layanan sosial yang tersedia. PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan program perlindungan sosial berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan (Andayani, S, 2018). Sementara menurut Edi Suharto (2014), PKH adalah bentuk intervensi kebijakan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat yang mendorong perubahan perilaku keluarga miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/ Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis (Ansori, 2016). Sementara menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019) bahwa, PKH merupakan program strategis penanggulangan kemiskinan yang berbasis keluarga dengan pendekatan bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

### **Pengertian Kesejahteraan Keluarga**

Kesejahteraan berasal dari kata "Sejahtera". Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta "Catera" yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti "Catera" (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya amantenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata "Socius" yang berarti kawan, teman dan kerja sama. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Fahrudin menyatakan bahwa, Program bantuan sosial seperti PKH merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan yang disertai kewajiban tertentu bagi penerima manfaat (Fahrudin, Adi, 2012).

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan- pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras

dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Menurut Kemensos, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya (Kementerian Sosial RI. (2021).

Kesejahteraan keluarga pada dasarnya menggambarkan sejauh mana sebuah keluarga mampu menjalani kehidupan yang layak dan berkualitas. Kondisi sejahtera tidak hanya berkaitan dengan kecukupan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kemampuan keluarga menjaga kesehatan anggotanya, memberikan pendidikan yang memadai bagi anak, serta membangun hubungan sosial yang baik di lingkungan tempat tinggalnya. Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi (Soetomo, 2014).

BKKBN menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga merupakan keadaan yang dilihat melalui beberapa aspek penting, yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Artinya, sebuah keluarga dianggap sejahtera apabila memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh layanan kesehatan, mampu menyekolahkan anak-anaknya, dan memiliki interaksi sosial yang harmonis.

Dengan demikian, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan, tetapi juga dari bagaimana keluarga mampu menciptakan kehidupan yang stabil dan memberi rasa aman bagi seluruh anggota. Kualitas hidup secara keseluruhan menjadi ukuran utama apakah sebuah keluarga sudah dapat dikatakan sejahtera atau masih membutuhkan dukungan, termasuk dari program-program perlindungan sosial seperti PKH.

Kesimpulan dari penjelasan di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat yang dilakukan dengan sadar dan terencana dalam Pembangunan dengan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat untuk memperbaiki yang belum baik dan membuat yang baik menjadi lebih baik lagi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah pendampingan dan khususnya memberikan akses pendidikan dan kesehatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dan bagaimana proses pendistribusian bantuannya di Desa Pondok Batu Aek Nabara. Untuk mendapatkan informan dan data yang dibutuhkan, Penelitian dilaksanakan di Desa Pondok Batu Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive) karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang aktif menerima dan melaksanakan Program Keluarga Harapan.

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pondok Batu Aek Nabara. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam program. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan secara purposive juga membantu peneliti mendapatkan informasi dari sumber yang benar-benar memahami pelaksanaan PKH sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang dihimpun dan diolah serta di analisis sendiri oleh peneliti / observer secara langsung dari objeknya. Sementara data sekunder, yaitu data penelitian yang dihimpun dari bentuk data – data yang sudah jadi dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh orang lain (Nalom Siagian, 2021). Teknik pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan Data. penelitian ini menggunakan metode: (1) Observasi, (2) wawancara, (3) Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman ( dalam buku sugiyono 2022) mengemukakan bahwa aktifitas

dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktifitas dalam Analisis data sebagai berikut : (1) Data Reduction (Reduksi Data), (2) Data Display (Penyajian Data), (3) Conclusion Drawing /verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi )

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Aek Nabara merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Secara historis, kawasan Aek Nabara telah dikenal sejak masa perkembangan perkebunan di wilayah Labuhanbatu pada masa kolonial Belanda. Nama “Aek Nabara” berasal dari bahasa Batak, di mana kata “aek” berarti air atau sungai, sedangkan “nabara” dapat dimaknai sebagai air yang jernih atau aliran air yang bersih. Penamaan ini berkaitan dengan kondisi geografis wilayah tersebut yang pada masa awalnya memiliki sumber air alami berupa sungai dan mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.

Pada awal perkembangannya, wilayah Aek Nabara merupakan kawasan yang masih berupa hutan dan lahan kosong yang kemudian mulai dibuka oleh masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal untuk dijadikan permukiman serta lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi kawasan yang cukup strategis karena berada di jalur transportasi yang menghubungkan beberapa wilayah di Kabupaten Labuhanbatu.

Perkembangan wilayah Aek Nabara juga tidak terlepas dari aktivitas perkebunan yang berkembang pesat di daerah tersebut. Sejak masa kolonial, wilayah Labuhanbatu dikenal sebagai daerah perkebunan yang menghasilkan berbagai komoditas seperti karet dan kelapa sawit. Aktivitas perkebunan tersebut menarik banyak tenaga kerja dari berbagai daerah untuk datang dan menetap di wilayah Aek Nabara. Kondisi ini kemudian menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat serta terbentuknya komunitas masyarakat yang beragam dari segi suku, budaya, dan latar belakang sosial.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, wilayah Aek Nabara kemudian mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pemerintahan desa. Beberapa wilayah permukiman yang sebelumnya masih tergabung dalam satu kawasan administrasi kemudian mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuk beberapa desa, salah satunya adalah Desa Pondok Batu yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini.

Dalam perkembangannya, masyarakat di wilayah Aek Nabara sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perkebunan. Tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet menjadi komoditas utama yang banyak dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, buruh harian, serta pekerja di sektor informal lainnya.

Saat ini wilayah Aek Nabara terus mengalami perkembangan baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan bantuan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan sejarah perkembangan tersebut, wilayah Aek Nabara menjadi salah satu kawasan yang memiliki dinamika sosial ekonomi yang cukup menarik untuk diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Pondok Batu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini termasuk dalam wilayah administratif yang cukup berkembang di Kecamatan Bilah Hulu dan memiliki jumlah penduduk yang relatif padat dibandingkan beberapa desa lain di sekitarnya. Secara demografis, masyarakat Desa Pondok Batu terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Struktur penduduk di desa ini didominasi oleh kelompok usia produktif yang bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan kecil, serta pekerjaan informal lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sektor primer dan pekerjaan harian.

Jumlah penduduk Desa Pondok Batu mencapai sekitar 4.200 jiwa, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Penduduk tersebut terbagi dalam sekitar 1.200 lebih kepala keluarga yang tersebar di beberapa dusun yang terdapat dalam wilayah desa. Komposisi penduduk ini

menunjukkan bahwa desa memiliki jumlah keluarga yang cukup besar dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang beragam.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Pondok Batu masih bervariasi. Sebagian masyarakat telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sementara sebagian lainnya masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Di wilayah sekitar desa terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar dan sekolah swasta yang melayani kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.

Dalam aspek keagamaan dan sosial budaya, masyarakat Desa Pondok Batu dikenal memiliki kehidupan sosial yang cukup harmonis. Penduduk desa berasal dari berbagai latar belakang suku seperti Batak, Jawa, dan Melayu yang hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Keragaman ini membentuk pola interaksi sosial yang saling menghargai serta memperkuat nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kondisi demografi Desa Pondok Batu juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh perkebunan kelapa sawit dan karet, pedagang kecil, serta pekerja sektor informal lainnya. Penghasilan masyarakat yang tidak selalu stabil menyebabkan sebagian keluarga masih tergolong dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin.

Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Dengan kondisi demografi yang demikian, Desa Pondok Batu memiliki dinamika sosial ekonomi yang cukup kompleks. Hal ini menjadikan desa tersebut sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Keadaan sosial masyarakat Desa Pondok Batu Aek Nabara menunjukkan adanya kehidupan masyarakat yang cukup dinamis dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi. Sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Bilah Hulu, desa ini memiliki masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini.

Masyarakat Desa Pondok Batu terdiri dari berbagai latar belakang suku dan budaya seperti suku Batak, Jawa, Melayu, serta beberapa suku lainnya. Keragaman tersebut tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat telah terbiasa hidup berdampingan secara harmonis. Nilai toleransi dan saling menghormati menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sosial masyarakat masih sangat kental dengan budaya gotong royong. Kegiatan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, maupun kegiatan keagamaan sering dilakukan secara bersama-sama oleh warga desa. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat masih cukup kuat. Selain itu, masyarakat Desa Pondok Batu juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan organisasi kepemudaan, kelompok pengajian, serta kegiatan posyandu yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya mempererat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga menjadi sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan mulai meningkat. Orang tua di desa ini umumnya berusaha menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun masih terdapat sebagian keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Di bidang kesehatan, masyarakat Desa Pondok Batu memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan layanan kesehatan lainnya yang tersedia di wilayah sekitar desa. Kegiatan posyandu rutin dilaksanakan untuk memantau kesehatan ibu hamil, balita, serta memberikan imunisasi bagi anak-anak. Namun demikian, kondisi sosial masyarakat di desa ini juga masih dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Sebagian masyarakat masih bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

#### 4. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pondok Batu Aek Nabara merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pendamping PKH, keluarga penerima manfaat (KPM), serta aparat desa, pelaksanaan program ini pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa dinamika yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa.

Proses pendistribusian bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat di Desa Pondok Batu dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu melalui sistem perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan. Keluarga penerima manfaat menerima bantuan secara bertahap dalam beberapa periode pencairan dalam satu tahun. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan berdasarkan data yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, diketahui bahwa sebelum bantuan disalurkan, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan, memberikan informasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa keluarga penerima manfaat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam program PKH, seperti memastikan anak tetap bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil serta balita.

Di Desa Pondok Batu, sebagian besar keluarga penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan tersebut sering digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anak, membayar kebutuhan pendidikan, serta memenuhi kebutuhan gizi bagi anggota keluarga. Dengan adanya bantuan ini, beban ekonomi keluarga menjadi sedikit berkurang sehingga mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Namun demikian, implementasi pendistribusian bantuan PKH di desa ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterlambatan dalam pencairan dana bantuan. Beberapa keluarga penerima manfaat menyampaikan bahwa jadwal pencairan bantuan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah diinformasikan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian bagi keluarga yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan adalah terkait dengan ketepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa terdapat keluarga yang secara ekonomi sudah cukup mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang dinilai lebih membutuhkan namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan pemutakhiran data masih memerlukan perbaikan agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai informan kunci, beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai informan utama, serta aparat desa sebagai informan tambahan. Data mentah yang diperoleh dari lapangan kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan kondisi nyata terkait pelaksanaan dan pendistribusian bantuan PKH di Desa Pondok Batu Aek Nabara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH di Desa Pondok Batu, diketahui bahwa program PKH telah berjalan selama beberapa tahun dan hingga saat ini masih aktif dilaksanakan. Pendamping menjelaskan bahwa proses pendistribusian bantuan dilakukan melalui sistem perbankan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Keluarga penerima manfaat menerima bantuan secara bertahap sesuai dengan jadwal pencairan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pendamping juga menyampaikan bahwa sebelum pencairan bantuan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi dan

pemutakhiran data penerima bantuan untuk memastikan bahwa keluarga yang menerima bantuan masih memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin.

Dalam wawancara tersebut, pendamping PKH menjelaskan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat di Desa Pondok Batu tergolong cukup banyak. Sebagian besar penerima manfaat berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang bekerja sebagai petani, buruh harian, ataupun pekerja sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Pendamping juga menyampaikan bahwa salah satu tugas utama yang dilakukan adalah melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat serta memberikan pemahaman mengenai tujuan program PKH.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan PKH dirasakan cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu informan menyampaikan bahwa bantuan tersebut biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah anak seperti buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya. Selain itu, bantuan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan makanan ataupun kebutuhan kesehatan bagi anggota keluarga.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara juga ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKH di Desa Pondok Batu. Beberapa informan menyampaikan bahwa terkadang terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan sehingga keluarga harus menunggu lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini membuat sebagian keluarga merasa khawatir karena bantuan tersebut sering kali telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Selain itu, beberapa masyarakat juga menyampaikan adanya anggapan bahwa masih terdapat ketidaktepatan dalam penentuan penerima bantuan. Menurut mereka, terdapat beberapa keluarga yang dinilai sudah cukup mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Sebaliknya, terdapat pula keluarga yang dianggap lebih membutuhkan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai keadilan dalam proses pendataan penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pondok Batu, terlihat bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat memang berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas. Rumah yang ditempati oleh sebagian keluarga penerima manfaat masih tergolong sederhana dan sebagian besar kepala keluarga bekerja pada sektor pekerjaan yang tidak memiliki pendapatan tetap.

Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa kegiatan pertemuan kelompok yang dilaksanakan oleh pendamping PKH masih dilakukan secara berkala di desa tersebut. Kegiatan ini biasanya berisi penyampaian informasi mengenai program PKH, kewajiban penerima bantuan, serta edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua keluarga penerima manfaat dapat selalu hadir dalam kegiatan tersebut karena sebagian dari mereka harus bekerja pada waktu yang bersamaan.

Dari hasil dokumentasi yang diperoleh di kantor desa, diketahui bahwa data keluarga penerima manfaat PKH di Desa Pondok Batu tercatat dalam administrasi desa dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program. Data tersebut memuat informasi mengenai jumlah keluarga penerima manfaat serta kategori bantuan yang diterima oleh masing-masing keluarga sesuai dengan kondisi anggota keluarga mereka.

Secara keseluruhan, data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pondok Batu telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut, seperti keterlambatan pencairan bantuan, proses pemutakhiran data penerima, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), serta aparat desa, diperoleh berbagai informasi mengenai pelaksanaan dan pendistribusian bantuan PKH di Desa Pondok Batu Aek Nabara.

Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH, diketahui bahwa program PKH telah berjalan selama beberapa tahun di desa tersebut dan bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Proses penyaluran bantuan dilakukan melalui sistem perbankan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan bantuan diberikan secara bertahap sesuai dengan jadwal pencairan yang telah ditetapkan. Pendamping PKH juga memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan, verifikasi data penerima manfaat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan keluarga penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan tersebut umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, membeli perlengkapan sekolah, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Namun demikian, beberapa informan juga menyampaikan bahwa terkadang terjadi keterlambatan dalam proses pencairan bantuan sehingga keluarga harus menunggu lebih lama untuk menerima bantuan tersebut.

Selain itu, hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa pemerintah desa turut berperan dalam mendukung pelaksanaan program PKH, terutama dalam hal pendataan masyarakat yang tergolong kurang mampu serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait program bantuan sosial. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan.

Secara keseluruhan, hasil transkrip wawancara menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat desa, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek seperti ketepatan sasaran penerima bantuan dan kelancaran proses pencairan bantuan agar program dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan tehnik wawancara, pengumpulan dokumentasi dan observasi lapangan. Penulis berhasil mendapatkan data dan informasi tentang “ Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pendistribusian Bantuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus di Desa Pondok Batu Aek Nabara kecamatan Bilah Hulu Labuhan Batu”. Peneliti mengubah data-data yang didapatkan dalam bentuk tulisan baik berupa rekaman suara maupun catatan tulisan tangan. Data yang diolah sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan peneliti. (dapat dilihat di bagian lampiran)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan beberapa keluarga penerima manfaat di Desa Pondok Batu Aek Nabara, dapat disimpulkan sementara bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa tersebut pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Proses pendataan dilakukan melalui usulan dari pihak desa kemudian diverifikasi oleh pendamping PKH sebelum bantuan disalurkan kepada penerima melalui rekening bank.

Dari sisi penerima manfaat, bantuan PKH dirasakan cukup membantu terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti membeli perlengkapan sekolah serta membantu kebutuhan kesehatan dan kebutuhan dasar keluarga. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi meskipun jumlahnya tidak sepenuhnya mencukupi semua kebutuhan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain adanya data penerima yang belum sepenuhnya tepat sasaran, perubahan data keluarga yang belum segera diperbarui, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat terkait penerima bantuan. Selain itu, pada beberapa kasus terdapat ketidakpastian waktu pencairan bantuan.

Secara umum, program PKH memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat di Desa Pondok Batu karena dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung keberlanjutan pendidikan anak, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal pendataan dan pengawasan agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

#### Dampak Program PKH terhadap Kesejahteraan Keluarga

Sebagian besar keluarga penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan PKH memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarga mereka. Meskipun bantuan yang diterima tidak sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, namun bantuan tersebut cukup membantu dalam memenuhi

kebutuhan dasar. Beberapa informan juga menyatakan bahwa bantuan PKH membantu anak-anak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pondok Batu secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini.

1. Komunikasi

Komunikasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa di Desa Pondok Batu berjalan dengan cukup baik. Pendamping PKH secara rutin menyampaikan informasi terkait program kepada masyarakat melalui pertemuan kelompok.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan PKH juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya seperti pendamping PKH yang bertugas melakukan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pelaksana program juga mempengaruhi keberhasilan program. Dalam hal ini, pendamping PKH memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan PKH di Desa Pondok Batu mengikuti struktur birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta beberapa keluarga penerima manfaat di Desa Pondok Batu Aek Nabara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKH di desa tersebut pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses awal pelaksanaan program dimulai dari pendataan calon penerima manfaat yang umumnya diusulkan oleh perangkat desa atau kepala dusun berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat. Setelah itu data tersebut diverifikasi oleh pendamping PKH untuk memastikan kelayakan calon penerima bantuan sebelum disampaikan kepada pihak Kementerian Sosial. Apabila telah dinyatakan layak, maka keluarga penerima manfaat akan dibuatkan rekening bank dan bantuan disalurkan langsung melalui rekening tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan tidak hanya menerima dana bantuan, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut antara lain mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping PKH serta memenuhi komitmen yang berkaitan dengan komponen bantuan yang diterima, seperti memastikan anak tetap bersekolah dengan tingkat kehadiran yang baik dan mengikuti kegiatan kesehatan seperti posyandu bagi balita maupun lansia. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH tidak hanya bertujuan memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat.

Dari hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat, sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan PKH cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam hal biaya pendidikan anak. Bantuan tersebut umumnya digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, tas, sepatu, seragam sekolah, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pendidikan anak. Selain itu, beberapa keluarga juga memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan makanan atau kebutuhan rumah tangga. Bagi keluarga yang memiliki anggota lansia atau membutuhkan layanan kesehatan, bantuan tersebut juga dianggap membantu dalam mendukung biaya pengobatan atau pemeriksaan kesehatan.

Walaupun demikian, dari hasil wawancara juga ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan ketepatan sasaran penerima bantuan. Menurut pendamping PKH, masih terdapat beberapa kasus dimana masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal ini dapat terjadi karena data yang digunakan belum sepenuhnya diperbarui atau karena kurangnya kejujuran dari sebagian masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi mereka.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan berkaitan dengan pembaruan data penerima manfaat. Setiap perubahan kondisi keluarga seperti anak yang naik jenjang pendidikan, anggota keluarga yang menikah, atau meninggal dunia seharusnya segera dilaporkan agar data dapat diperbarui. Namun pada kenyataannya tidak semua perubahan tersebut langsung dilaporkan, sehingga terkadang menimbulkan masalah dalam proses pencairan bantuan. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa pada kondisi tertentu bantuan tidak selalu cair pada waktu yang sama setiap tahapnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian penerima.

Dari sisi sosial, program PKH juga menimbulkan kecemburuan di antara masyarakat. Beberapa warga yang tidak menerima bantuan merasa iri terhadap warga lain yang mendapatkan bantuan, terutama jika mereka menilai bahwa penerima bantuan tersebut sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masyarakat. Pentingnya pendamping PKH dan Kepala desa turun kemasyarakat untuk menerima kritik dan saran masyarakat yang seharusnya mendapat program PKH itu karena mereka bagian dari keluarga yang tidak mampu menjadi bagian peserta, dan keluarga yang ekonominya mampu supaya ditindak lanjut agar program itu tepat sasaran dengan baik. Hal ini dilakukan agar tidak terulang lagi masalah seperti adanya temuan keluarga ibu Roudotussofa yang dikeluarkan dari PKH karena tidak tepat sasaran karena si penerima sebelumnya menerima bantuan PKH sejak tahun 2023, sudah menjadi P3K tahun 2025 sehingga sudah memperoleh pendapatan tetap.

Meskipun terdapat beberapa kendala, secara umum program PKH dinilai memberikan dampak yang cukup positif bagi keluarga penerima manfaat di Desa Pondok Batu. Bantuan yang diberikan mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan tersebut, mereka merasa lebih terbantu dalam membiayai sekolah anak sehingga anak-anak mereka dapat tetap melanjutkan pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pondok Batu telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, namun masih diperlukan perbaikan terutama dalam hal pendataan, pembaruan data penerima, serta pengawasan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

## **Saran**

Untuk meningkatkan keberhasilan dan efektivitas implementasi distribusi PKH di desa Pondok Batu Aek Nabara, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
2. Pendamping PKH diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan program, kriteria penerima, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
3. Pemerintah desa diharapkan ikut berperan dalam proses pengawasan dan pendataan masyarakat miskin, sehingga dapat membantu memastikan bahwa keluarga yang benar-benar membutuhkan dapat terdaftar sebagai penerima bantuan.
4. Keluarga penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan secara lebih bijak, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga sesuai dengan tujuan utama program PKH.
5. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat, agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan dengan baik.
6. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa program PKH diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga dapat mengurangi kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.
7. Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program PKH, khususnya terkait ketepatan sasaran dan kelancaran penyaluran bantuan, agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan saran yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pondok Batu perlu didukung dengan pendataan yang lebih akurat, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama yang baik antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain itu, keluarga penerima manfaat juga diharapkan dapat menggunakan bantuan yang diterima secara bijak sesuai dengan tujuan program. Dengan adanya upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, S. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta
- Siagian Nalom, (2021), *Statistika Dasar: Konseptualisasi Dan Aplikasi*, ISBN: 978-623-378-086-5, Percetakan CV Kultura Digital Media, Surakarta, Cetakan pertama
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, (2022), *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Afiabeta).

**Halaman ini dikosongkan**